

**NASKAH PUBLIKASI**

**PERAN PASUKAN PERDAMAIAN INDONESIA DALAM MISI  
KEAMANAN DI LEBANON 2006-2012**



Di Susun Oleh:

Hamdy Maulana, S.IP  
20131060008

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUBUNGAN  
INTERNASIONAL  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2018**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Dengan ini selaku mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Nama : Hamdy Maulana

NIM : 20131060008

Jenjang Program Studi : S2 Magister Ilmu Hubungan Internasional

**SETUJU** jika naskah publikai (jurnal ilmiah) yang disusun oleh yang bersangkutan setelah mendapatkan arahan dari dosen pembimbing, dipublikasikan untuk kepentingan akademik

Yogyakarta, 6 Juni 2018

Hamdy Maulana

## PERAN PASUKAN PERDAMAIAN INDONESIA DALAM MISI KEAMANAN DI LEBANON 2006-2012

Hamdy Maulana

Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Pasca Sarjana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yogyakarta, Indonesia

[hamdymaulana19@gmail.com](mailto:hamdymaulana19@gmail.com)

**Abstrak** — Gagasan mengenai perdamaian dunia menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan terutama setelah pecahnya Perang Dunia II. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan perdamaian dengan melibatkan anggota PBB, dimana Indonesia termasuk didalamnya. Indonesia telah menunjukkan peranannya sebagai pihak yang berpartisipasi aktif mengimplementasikan perdamaian dengan mengirimkan Pasukan Perdamaian ke ke Lebanon yang tergabung pada pasukan UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon). Terdapat 3 faktor yang menyebabkan Indonesia ikut terlibat dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Lebanon yaitu agama, histori, dan idealisme pada UUD 1945. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2009-2012.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu Dedi Irwanto Nugroho yang pernah bergabung pada Kontingen Garuda sebagai pasukan perdamaian PBB.

Hasil penelitian menemukan bahwa pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Lebanon mampu meningkatkan citra Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merupakan cerminan dari idealisme bangsa Indonesia untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Kegiatan yang dilakukan oleh kontingen pasukan perdamaian Indonesia di mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Lebanon pasca konflik. Hal ini terlihat dari bagaimana penerimaan yang diterima pasukan perdamaian Indonesia dari masyarakat Lebanon. Pasukan TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda/UNIFIL tidak segan-segan untuk berbaur dengan masyarakat. Penerapan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam misi perdamaian PBB di Lebanon mampu menunjang peran dan fungsi Kontingen Garuda/UNIFIL dalam menjalankan tugas-tugasnya.

**Kata Kunci: Konflik, Pasukan Perdamaian, UNIFIL.**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gagasan mengenai perdamaian dunia menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan terutama setelah pecahnya Perang Dunia II pada tahun 1941-1945. Refleksi atas kengerian dampak kerusakan akibat PD II tersebut, melahirkan gagasan tentang perlunya mencegah terulangnya tragedi hidup manusia. Bangsa-bangsa di dunia berupaya bekerjasama menjaga terciptanya perdamaian sekaligus membantu menyelesaikan persoalan-persoalan konflik yang memicu terjadinya perang. Kesadaran ini menumbuhkan keinginan masyarakat dunia untuk membangun kembali kerjasama internasional dan upaya-upaya penyelesaian konflik serta permasalahan-permasalahan internasional lainnya. Untuk itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan perdamaian dengan melibatkan anggota PBB, dimana Indonesia termasuk didalamnya dan ikut terlihat dalam berbagai upaya untuk menjaga perdamaian dan mengatasi konflik antar negara-negara di dunia.

Berkaitan dengan peranan Indonesia pada penyelesaian konflik luar negeri, menurut Setiawati ada empat peranan yang dapat diambil Indonesia dalam penyelesaian suatu konflik antar Negara atau kelompok, yaitu sebagai: *pertama* mediator atau penengah pihak yang berkonflik, *kedua* fasilitator yaitu memberi fasilitas pada pihak yang konflik untuk berunding, *ketiga* partisipan yaitu terlibat langsung untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencegah supaya tidak muncul konflik baru misal sebagai pasukan penjaga perdamaian, dan sebagai *keempat* justifikator yaitu memberi justifikasi penyelesaian konflik [1].

Dalam hal penyelesaian konflik antara negara-negara Arab-Israel, Indonesia telah menunjukkan peranannya terutama sebagai partisipan atau pihak yang berpartisipasi aktif mengimplementasikan perdamaian dengan mengirimkan Pasukan Perdamaian ke Sinai Pasca Perang Sinai 1956 yang tergabung di dalam UNEF (*United Nations Emerging Forces*), dan ke Lebanon khususnya setelah serangan Israel atas Lebanon Selatan di tahun 2006 yang

kemudian tergabung dalam pasukan Perdamaian PBB UNIFIL (*United Nations Interim Forces in Lebanon*).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 85%, Indonesia merasa memiliki kedekatan hubungan dengan Lebanon maupun dengan negara-negara Arab lainnya yang merupakan negara tempat lahirnya Agama Islam. Selain itu, keteritakatan Indonesia dengan Lebanon muncul dikarenakan Lebanon merupakan salah satu dari beberapa negara Arab (Suriah, Yordania, Irak, dan Lebanon, dan negara Liga Arab) yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Adanya kedekatan secara agama dan historis inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia merasa perlu membantu Lebanon dan negara-negara Arab yang lain dalam menyelesaikan berbagai konflik baik internal maupun eksternal.

Berdasarkan sejarah, konflik yang terjadi antara Lebanon dan Israel bermula ketika Hizbullah melakukan penyerangan lewat udara ke wilayah Israel Utara yaitu kota Shlomi dan juga menembakan roket Angkatan Pertahanan Israel IDF (*Israeli Defence Force*). IDF yang sedang melakukan patroli di perbatasan menjadi korban yang mengakibatkan delapan tentara IDF tewas serta ditangkapnya dua tentara lainnya (Ehud Goldwasser dan Elgad Regev). Tentara Hizbullah juga menembakkan roket dan mortir secara beruntun ke wilayah utara Israel lainnya sebagai suatu pengalihan perhatian pada waktu yang sama.

Israel membalas menyerang Lebanon dengan menggunakan alasan penawanan dua tentara Israel oleh Hizbullah dalam suatu serangan lintas perbatasan. Menurut pejabat Israel diduga kedua tentara itu dibawa ke Iran. Hizbullah berencana melakukan penukaran tawanan dalam membebaskan warga Lebanon dan Palestina yang ditahan Israel. Serangan besar Israel ini diluar dugaan Hizbullah yang sebelumnya memperkirakan Israel hanya akan membalasnya dengan Operasi Komando untuk membalas menculik anggota Hizbullah, seperti yang sebelumnya pernah dilakukan. Tampaknya Israel telah lama mempersiapkan serangan ini atas dukungan dari Amerika Serikat, sebagai

penjajakan untuk serangan berikutnya ke Iran. Hizbullah membalas kembali dengan meluncurkan roket-roket ke kawasan utara Israel.

Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengatakan serangan akan dihentikan jika Hizbullah membebaskan dua tentara Israel yang disandera. Israel menuduh Hizbullah telah meluncurkan 130 roket dalam waktu 48 jam yang menyebabkan belasan warga tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Di saat yang sama, milisi Hizbullah meminta Israel segera menghentikan agresi militernya di wilayah Palestina. Namun, Israel sejak awal menolak berkompromi, dan kemudian melancarkan serangan ke sejumlah kamp milik Fatah dan Hamas. Termasuk beberapa lokasi yang dicurigai potensial untuk melarikan Kopral Gilad Shalit dari tempat penyergapannya di selatan Gaza ([www.globalresearch.ca](http://www.globalresearch.ca)).

Dalam tujuh malam berturut-turut sejak penculikan tentara Israel, Jalur Gaza digempur serangan udara. Israel berusaha meningkatkan aksi militernya untuk membebaskan anggotanya. Selain dari darat, militer Israel menggempur Beirut dari udara. Sebuah kawasan pinggiran kota yang banyak dihuni kelompok Hizbullah hancur. Jembatan di wilayah Akkar, beberapa tempat di lembah Bekaa, serta ruas jalan dekat perbatasan Suriah juga tidak luput dari serangan peluru kendali Israel). Akibatnya distribusi makanan dan obat-obatan bagi warga sipil sulit disalurkan. Menurut Perdana Menteri Lebanon Fouad Siniora, dalam serangan itu sepertiga dari jumlah korban tewas berusia dibawah 12 tahun. Satu juta warga Lebanon atau seperempat populasinya kini kehilangan tempat tinggal [2].

Selain itu, Israel juga menyerang Lebanon pada tanggal 5-6 Agustus 2006. Israel antara lain menggempur kota Tirus, Nakburah dan Nabatiyeh di Lebanon Selatan. Israel juga menyerang markas Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) di Lembah Bekaa. Serangan Israel itu telah menewaskan sedikitnya lima penduduk dan 12 lainnya luka-luka di Desa Al-Ansar dekat Nabatiyeh. Menurut laporan AFP, kelimanya tewas ketika rudal Israel jatuh di sebuah rumah. Selain itu, tiga orang tewas di Nakoura, Lebanon Selatan. Mereka juga tewas akibat tembakan rudal Israel [2].

Mengenai konflik yang terjadi di Lebanon tersebut, kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian ke Lebanon tidak dapat dilepaskan dari idealisme bangsa Indonesia untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Disamping itu platform politik luar negeri bebas aktif memberikan dorongan agar Indonesia terlibat secara aktif untuk ikut serta dan berkontribusi bagi upaya perdamaian di seluruh dunia. Kehadiran Indonesia dalam operasi perdamaian yang digelar secara internasional pada masa tersebut memiliki arti penting sebagai implementasi dari nilai politik luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia kepada dunia.

Arti penting pengiriman pasukan dalam misi perdamaian PBB juga terkait dengan pendekatan terhadap masyarakat di negara dimana misi tersebut dilaksanakan. Kondisi ini terkait dengan tugas yang diemban tidak dapat dilepaskan dengan interaksi diantara pasukan TNI dengan masyarakat dimana mereka ditempatkan. Saat ini, jumlah personel Indonesia yang tengah bertugas dalam berbagai UN PKO (sesuai data *United Nations Department of Peacekeeping Operations* per 30 November 2015) adalah sejumlah 2.840 personel, dan menempatkan Indonesia di urutan ke-12 dari 124 *Troops/Police Contributing Countries* (T/PCC). Personel dan Pasukan Kontingen Garuda tersebut bertugas di 10 (sepuluh) MPP PBB, yaitu UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSCA (Repubik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Sahara Barat), MINUSTAH (Haiti), UNMIL (Liberia), UNMISS (Sudan Selatan), dan UNISFA (Abyei, Sudan) (Kemlu.go.id)

Keberadaan pasukan TNI di luar negeri dalam misi perdamaian secara tidak langsung merupakan representasi dari Indonesia sebagai sebuah negara. Keberadaan dari pasukan TNI sebagai bagian dari misi perdamaian PBB telah membuka sebuah peluang besar untuk menjembatani konektivitas sosial antara TNI sebagai representasi dari Indonesia dengan masyarakat dan kontingen angkatan bersenjata dari negara lain yang tergabung dalam misi PBB tersebut.

Salah satu wilayah dimana pasukan TNI secara reguler ditempatkan adalah di Lebanon Selatan, dimana dalam upaya pemeliharaan perdamaian pasukan TNI memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal maupun dengan kontingen pasukan penjaga perdamaian dari negara lain. Kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal di Lebanon Selatan dimanfaatkan dengan baik oleh TNI. Interaksi yang dilakukan oleh TNI dengan masyarakat di Lebanon Selatan menghasilkan sebuah penerimaan yang sangat baik terhadap keberadaan pasukan TNI di wilayah tersebut. Upaya untuk mendapatkan penerimaan serta pengelolaan terhadap interaksi tersebut menjadi sebuah fenomena tersendiri baik dikalangan kontingen UNIFIL maupun masyarakat Indonesia. Fenomena tersebut terkait dengan sulitnya kontingen UNIFIL dari negara lain untuk dapat diterima secara baik serta oleh masyarakat di Lebanon Selatan.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latarbelakang permasalahan, maka rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu: Bagaimana peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latarbelakang permasalahan, penulis merumuskan tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: menganalisis peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kontribusi dari penelitian yang ingin dicapai:

##### 1. Kontribusi Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan kontribusi permasalahan politik luar negeri khususnya yang berkaitan dengan peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012.



## 2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan luar negeri yang berkaitan upaya penyelesaian konflik antar negara atau kelompok.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012. Hal ini berbeda dengan riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut pemaparan beberapa riset terdahulu yang berkaitan dengan konflik luar negeri:

*Pertama*, penelitian Rachmat yang bertujuan untuk menganalisis praktek diplomasi publik yang dijalankan oleh pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung dalam UNIFIL. Hasil penelitian menemukan bahwa Diplomasi Publik yang saat ini tengah gencar dijalankan oleh berbagai negara di dunia dengan beragam variasi instrumen maupun metode membuat Indonesia perlu untuk menyadari arti penting dari praktek diplomasi publik. Salah satu praktek diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan pengiriman pasukan penjaga perdamaian dibawah payung PBB. Pengiriman pasukan penjaga perdamaian ini tidak hanya memberikan signifikansi terhadap keamanan dan perdamaian dunia yang dapat meningkatkan citra sebuah negara, namun juga dalam upaya untuk memperkenalkan diri di negara dimana misi tersebut dijalankan serta kepada negara-negara lain yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB [3].

*Kedua*, penelitian Sirmareza yang membahas tentang partisipasi Indonesia dalam misi UNIFIL MTF sebagai misi matra laut pertama dan satu-satunya di dunia sebagai sebuah naval diplomacy. Kajian-kajian terdahulu belum banyak menggunakan teori Ken Booth untuk mengembangkan *naval diplomacy* Indonesia, khususnya dalam pengiriman Satgas Maritim TNI. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis *naval diplomacy* dalam pengiriman Satgas Maritim TNI dan kontribusinya terhadap pencapaian kepentingan nasional dan sasaran kebijakan luar negeri Indonesia. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Indonesia menekankan dua kepentingan utama, yaitu pemeliharaan ketertiban dunia itu sendiri sebagaimana dijamin konstitusi, serta meningkatkan peran globalnya sebagai *middle power*. Dalam perspektif appropriateness yang dikemukakan Ken Booth, Satgas Maritim TNI memiliki fleksibilitas, mobilitas kemampuan proyeksi dan potensi akses untuk membawa misi diplomatik Indonesia. Secara empiris, Satgas Maritim TNI dalam derajat tertentu mendukung agenda-agenda kebijakan luar negeri Indonesia. Namun demikian, dipandang dari aspek simbolisme, peningkatan kuantitas perlu dipertimbangan agar Satgas Maritim TNI dapat menjadi signifier prestise dan komitmen internasional Indonesia yang maksimal [4].

*Ketiga*, penelitian Hutabarat yang membahas tentang partisipasi dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Berdasarkan pemahaman realis, partisipasi dalam operasi perdamaian dimaksudkan dapat memenuhi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan suatu pendekatan yang strategis dan holistik. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade berikutnya. Selain itu, penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama [5].

*Keempat*, penelitian Islamiyah dan Trilaksana yang bertujuan untuk mengetahui (1) Apa upaya-upaya yang telah dilakukan PBB dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel 1967-1995, (2) Bagaimana implementasi kebijakan PBB dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel 1967-1995, dan (3) Bagaimana dampak kebijakan PBB, bagi Palestina maupun Israel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan PBB dinilai tidak efektif hal tersebut dapat dinilai ketika upaya PBB dalam mengimplementasikan kebijakannya tidak berhasil dijalankan oleh pihak yang bersengketa. Perdamaian dan keamanan jauh dari cita-cita khususnya keikutsertaan Amerika Serikat dalam menggagalkan Veto terkait perdamaian Timur Tengah dan lebih mendukung Israel merdeka tanpa melihat dari segi Palestina. Hambatan lain yakni kurangnya dukungan dari bangsa Arab sendiri dimana terjadi konflik internal yang terjadi antara Hamas dan Fattah yang memiliki perbedaan pandangan sehingga konflik ini sulit diselesaikan [6].

#### F. Kerangka Teoritik

*Peacekeeping* adalah suatu teknik yang dikembangkan oleh PBB untuk membantu menyelesaikan konflik bersenjata. *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO) adalah operasi *Peacekeeping* PBB yang pertama. Operasi tersebut terdiri atas pengamat militer tidak bersenjata (*unarmed military observers*) yang dikirim ke Palestina pada bulan Juni 1948 untuk mengawasi kesepakatan yang dilakukan oleh Count Bernadotte dalam perang pertama antara Israel dan Arab. Langkah utama dilakukan saat pasukan bersenjata PBB (*the United Nations Emergency Force* atau UNEF) yang ditugaskan di Mesir akibat serangan Anglo-French-Israeli terhadap negara tersebut bulan Oktober 1956.

*Peacekeeping* dapat disimpulkan dalam 5 (lima) prinsip, yaitu:

1. *Pertama*, *peacekeeping operation* adalah operasi PBB. PBB yang menyebabkan *peacekeeping operation* dapat diterima negara anggota dimana keberadaan pasukan asing berada di wilayah kawasan negara tersebut.

2. Kedua, *peacekeeping operation* selama ini dapat dilakukan dengan adanya “*consent of the parties to the conflict in question*”. Selain itu, misi dapat berhasil dengan tetap berlanjutnya “*consent*” dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang bertikai.
3. Ketiga, *peacekeepers* harus bersikap “*impartial*” di antara kelompok yang ada. Keberadaan Pasukan PBB tidak berupaya memaksakan kepentingan satu kelompok terhadap kelompok yang lain.
4. Keempat, prinsip terkait dengan kebutuhan pasukan bagi UN *Peacekeeping Operation*. Charter PBB menyatakan bahwa negara anggota terikat dengan DK PBB untuk berkomitmen dalam penyediaan pasukan. Prinsip kelima berkaitan dengan “*use of force*”. Lebih dari setengah *peacekeeping operation* sebelum tahun 1988 hanya terdiri dari pengamat militer tidak bersenjata. Namun saat pertempuran bersenjata terjadi, prinsipnya adalah *use of force* dilakukan seminimal mungkin dan hanya boleh dilakukan dalam skema pembelaan diri (*fire should be opened only in self-defence*).

UN *peacekeeping* membantu negara-negara yang terpecah akibat konflik dan mengupayakan terwujudnya kondisi bagi perdamaian berkelanjutan. *Peacekeeping* telah terbukti menjadi salah satu alat yang paling efektif bagi PBB guna membantu host countries melalui masa yang sulit dari fase konflik menuju perdamaian. *Peacekeeping* memiliki kekuatan yang unik, termasuk “*legitimacy, burden sharing, and an ability to deploy and sustain troops and police*” dari seluruh dunia; melakukan integrasi dengan *civilian peacekeepers*; hingga “*advance multidimensional mandates*”. UN *peacekeepers* menyediakan keamanan dan dukungan politik dan “*peacebuilding support*” untuk membantu negara melewati transisi dari konflik menuju perdamaian.

Terdapat lima motivasi yang menjadi pertimbangan suatu negara untuk memberikan kontribusi pasukan penjaga perdamaian PBB, yaitu:

1. Politik. Partisipasi sebagai pasukan penjaga perdamaian dapat membantu negara dalam memenuhi tujuan politiknya. Sejumlah negara mendapatkan penghargaan dan otoritas dalam institusi internasional, khususnya PBB, yang memungkinkannya menyuarakan isu kemanan internasional [7].

Terdapat beberapa alasan politik mengapa negara melakukan kontribusi pada pasukan PBB, antara lain tekanan atau persuasi oleh negara sekutu, negara besar, atau Sekjen PBB, dan persepsi bahwa kontribusi pada pasukan PBB. memperkuat “*national prestige*” negara atau mungkin memperkuat pencalonannya untuk kursi tidak tetap pada Dewan Keamanan PBB [8].

2. Ekonomi. Argument utamanya adalah insentif ekonomi merupakan alasan utama bagi kontribusi Pasukan PBB. Salah satu elemen utama dari argumen ini adalah adanya sistem pembayaran kompensasi PBB bagi negara yang menyediakan pasukan PBB. Namun dalam pertimbangan finansial ini, perlu didefinisikan terkait siapa saja yang memperoleh manfaat.
3. Keamanan. Operasi penjaga perdamaian PBB tidak selalu diasosiasikan dengan pertahanan nasional atau kepentingan utama keamanan nasional. Negara biasanya memiliki pandangan bahwa penyediaan pasukan PBB akan mempromosikan kepentingan keamanan nasionalnya yang lebih luas [8]. Dalam hal ini, tingkat persepsi ancaman dalam konflik tertentu dapat menjadi pendorong utama terkait keputusan untuk memberikan kontribusi Pasukan PBB. Kedekatan wilayah juga berperan penting dalam menerima kontribusi dari negara tetangga atau kawasan terdekat. Terdapat juga satu kemungkinan dimana negara-negara lebih besar dengan pola pikir internasionalis berpandangan bahwa kepentingan keamanan nasionalnya berada dalam konteks yang lebih global.
4. Institusi. Partisipasi dalam Pasukan PBB dapat berakar dari motivasi yang berhubungan dengan angkatan bersenjata, sektor keamanan, dan dinamika birokrasi suatu negara. Keputusan untuk terlibat dalam operasi PBB biasanya diambil dalam konteks hubungan sipil-militer [7]. Terdapat juga argumen bahwa besar, kualitas, dan postur angkatan bersenjata berkaitan dengan kontribusi negara tersebut pada operasi perdamaian PBB. Selain itu, pihak militer juga melihat operasi perdamaian PBB sebagai suatu hal yang menarik karena memberikan pengalaman internasional yang berharga bagi personel terkait, pandangan lain terkait hal ini adalah bahwa ini merupakan salah satu upaya “militer sibuk di luar negeri daripada terlibat dalam urusan

domestik” suatu negara, atau rehabilitasi setelah periode kepemimpinan yang sebelumnya otoriter. Sementara bagi sebagian negara, partisipasi dalam operasi perdamaian PBB dapat juga dilihat sebagai peran yang memiliki prestige setelah Perang Dingin. Partisipasi ini dapat mencegah pemotongan anggaran militer secara signifikan akibat situasi damai pasca berakhirnya Perang Dingin.

5. Norma. Negara memberikan kontribusi pada Pasukan PBB dapat didasarkan pada alasan normatif.

Alasan ini khususnya untuk “*self-images*” sebagai “*global good Samaritans*”, “*good international citizens*”, atau sebagai anggota grup “*non-aligned*” dari negara yang mendukung PBB sebagai alternatif terhadap hegemoni “*great power*”, atau sebaiknya merupakan hal yang seharusnya dilakukan. sementara beberapa negara mempertahankan komitmen prinsipnya pada PBB dengan melihatnya sebagai “*legitimate system*” dari mana manajemen konflik mengharapkan peran pendukung sebagai “*good international citizen*”. Indonesia dalam perannya sebagai kontributor, secara normatif berkomitmen pada tujuan keamanan dan perdamaian PBB yang sejalan dengan konstitusi pada Pembukaan UUD 1945, alinea keempat. India memandang PBB sebagai suatu alternatif terhadap *great power hegemony* dan instrumen “*nonaligned approach*” terhadap keamanan dan perdamaian. Pandangan ini juga tampak dalam keterlibatan Brazil dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

## II. METODE PENELITIAN

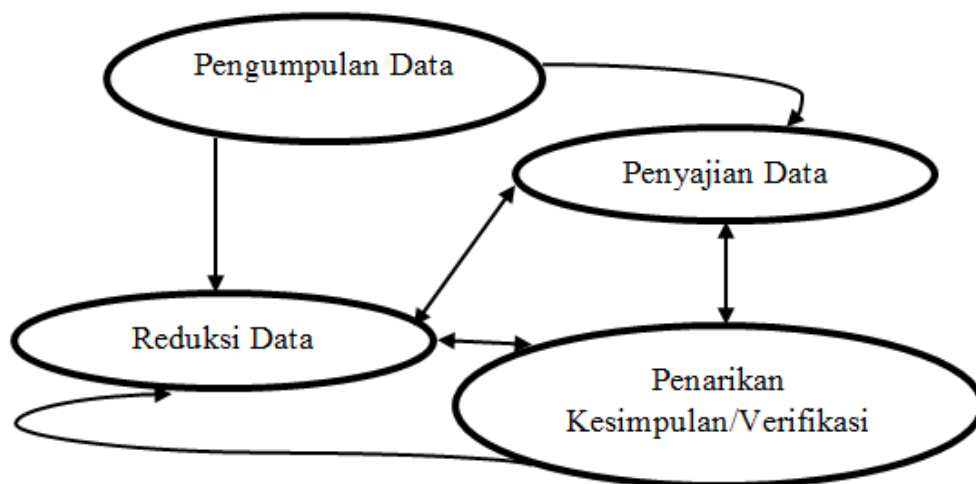
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kejadian pada saat sekarang secara apa adanya [9]. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.

Subjek penelitian dibutuhkan peneliti untuk mencari data beserta informasi mengenai penelitian yang dilakukan. Data dan informasi yang diperoleh nantinya

akan digunakan untuk menganalisis peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan subjek tunggal yaitu Agus Harimusti Yudhoyono yang pernah bergabung pada Kontingen Garuda XXIII-A sebagai pasukan perdamaian PBB.

Kegiatan analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel, mentabulasi data berdasarkan variabel, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis Miles dan Huberman [10]. Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar I. Analisis Interaktir Miles dan Huberman

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Indonesia dalam Pasukan Perdamaian UNIFIL di Lebanon

Penurunan pasukan perdamaian PBB di Lebanon dimulai pada tahun 1978 di bawah Resolusi Dewan Keamanan 425 dan 426. Menyikapi peningkatan tensi konflik yang muncul di perbatasan Israel-Lebanon di awal tahun 1970an, DK PBB membentuk *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) untuk menangani invasi Israel di Lebanon selatan yang menjadi daerah konfrontasi militer antara pemerintah Israel dan Palestina di wilayah tersebut.

Selama tiga tahun pertama penempatan UNIFIL di perbatasan Israel-Lebanon, atau biasa disebut dengan *the Blue Line* tugas dari pasukan perdamaian PBB terbatas pada penyediaan perlindungan dan asistensi kemanusiaan kepada penduduk lokal. Hal ini dikarenakan, meskipun Israel telah menarik mundur pasukan dari wilayah Lebanon, akan tetapi kontrol Israel melalui *Israel Defence Forces* dan *Lebanese de facto forces* masih besar di kawasan tersebut. Oleh karenanya, Dewan Keamanan PBB berusaha untuk tetap melakukan pengawasan sekaligus menjaga negosiasi kepada pemerintah Israel untuk segera meninggalkan wilayah Lebanon. Selanjutnya, pada Juli tahun 2000, pihak Israel mulai menarik mundur pasukan militer mereka. Menyusul penarikan mundur tersebut, pada tahun 2004 DK PBB memperbaharui mandat terkait operasi UNIFIL melalui Resolusi 1559.

Wilayah Lebanon bukanlah wilayah yang dengan mudah dapat tercipta perdamaian. Meski kawasan tersebut telah dijaga dan diawasi oleh pasukan perdamaian, akan tetapi konflik-konflik minor masing sering terjadi di area Blue Line yang tak jarang menimbulkan korban dari pihak observer militer PBB. Pada tahun 2006, konflik kembali memuncak seiring dengan dilanggarnya gencatan senjata oleh kelompok Hizbullah dengan meluncurkan roket ke wilayah teritori Israel dan menyerang dan menahan beberapa pasukan patroli Israel. Perselisihan antara kelompok Hezbollah dan Israel yang semakin meningkat menyebabkan Dewan Keamanan PBB kembali membuat resolusi



1701 (2006), yang bertujuan untuk menghentikan serangan yang dilakukan pihak-pihak yang berkonflik.

Sejak pembentukan Resolusi 1701 Tahun 2006, mandate yang dikeluarkan oleh PBB terkait operasi perdamaian UNIFIL terus mengalami perkembangan dan pembaharuan mandate. Terhitung hingga 2015, DK PBB telah mengeluarkan sembilan resolusi untuk memperkuat dan memperpanjang operasi perdamaian guna terus membantu menjaga perdamaian di Lebanon (UN Security Council, 2015). Dalam menjaga perdamaian di Lebanon, PBB juga bekerja sama dengan pasukan militer dari negara-negara lain. Terdapat 10,410 personel berseragam, 279 international civilian, dan 590 staf sipil lokal yang bergabung dalam pasukan perdamaian PBB. Operasi perdamaian ini juga melibatkan lebih dari 30 negara yang mengirimkan personel militernya, tak terkecuali Indonesia. Pada saat ini, Indonesia masih menduduki peringkat ke 12 dari 122 negara yang paling banyak mengirimkan pasukan perdamaian. Lima negara yang menduduki peringkat teratas adalah Bangladesh, Ethiopia, India, Pakistan, dan Rwanda (Media Indonesia, 2015).

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memiliki ambisi untuk dapat masuk kedalam 10 besar negara pengirim pasukan perdamaian dengan membentuk Roadmap Vision 4,000 peacekeepers 2015-2019, dimana strategi yang dilakukan adalah menambah jumlah pasukan perdamaian Indonesia yang diturunkan dalam misi-misi pemeliharaan perdamaian PBB, salah satunya di Lebanon/UNIFIL. Lebanon merupakan area misi perdamaian PBB yang menjadi salah satu lokasi paling menjanjikan bagi Indonesia untuk menambah pasukan perdamaianya dikarenakan masih diperlukakannya pasukan perdamaian di wilayah tersebut.

Pasukan perdamaian Indonesia pertama kali bergabung dengan UNIFIL di tahun 2006 dan masih berkontribusi aktif hingga sekarang. Kontingen Garuda (Konga) yang dikirimkan untuk misi pemeliharaan perdamaian ke Lebanon pada awal keberangkatannya adalah Konga XXIII-A atau biasa disebut dengan INDOBATT, yang terdiri dari 850 personel Satuan Tugas Batalyon Mekanik (Satgas Yonis). Tujaun dari pasukan Konga XXIII-

A/UNIFIL adalah untuk membantu pasukan perdamaian PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Lebanon. Kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk mengirimkan Kontingen Garuda ke Lebanon ini dibuat berdasarkan Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 2006. Dalam Surat Keputusan Presiden tersebut diatur mengenai perihal pembentukan pasukan konga, perumusan kebijakan dan strategi, serta pendanaan yang berkaitan dengan keberangkatan, pelaksanaan operasi yang dilakukan oleh kontingen garuda di Lebanon. Surat Kepres inilah yang kemudian menjadi dasar atau landasan hukum yang mengatur tentang kontingen garuda di Lebanon. Pasukan konga tersebut pada umumnya akan melaksanakan tugas mereka di Lebanon untuk kurun waktu satu hingga dua periode masa tugas atau selama enam bulan hingga satu tahun bergantung permintaan dari DK PBB.

Sejak pengiriman Konga XXIII-A pada tahun 2006, terhitung sudah lebih dari 15 kontingen garuda yang pernah dikirimkan ke Lebanon hingga tahun 2015. Setelah masa tugas Konga XXIII-A/UNIFIL habis di tahun 2007, TNI kembali memberangkatkan pasukan Konga XXIII-B/UNIFIL untuk periode 2007-2008 yang terdiri dari 850 personel Satgas Yonif Mekanis, Konga XXIII-C/UNIFIL tahun 2008-2009, Konga XXIII-D/UNIFIL tahun 2009-2010 yang terdiri dari 1000 personel, dan Konga XXIII-E/UNIFIL untuk periode tahun 2010-2011. Pada periode ini kontingen garuda yang diwakili oleh Konga XXIII-E/UNIFIL mampu memperoleh penghargaan, tidak hanya medali Dag Hammarskjold PBB yang memang diberikan bagi pasukan pemeliharaan PBB, tetapi juga memperoleh Brevet Kehormatan pertama bagi pasukan perdamaian Indonesia. Pemberian Brevet ini kemudian menjadi bukti keberhasilan pasukan kontingen garuda Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai petugas pemeliharaan perdamaian internasional, serta sebagai pemicu pemerintah untuk semakin meningkatkan kinerja dan kapasitas pasukan perdamaian Indonesia.

Tidak hanya pasukan militer TNI yang dikirimkan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, pemerintah Republik Indonesia juga mengirimkan pasukan tambahan berupa prajurit polisi militer dalam misi ke

Lebanon di tahun 2008. Pengiriman prajurit polisi ini dilakukan sebagai bentuk respon terhadap perubahan mandat DK PBB yang ada dalam *Fragmentary Order* (Frago) No.10-10-08 yang dibentuk pada tanggal 30 Oktober 2008, dimana berdasarkan mandat tersebut, negara anggota diharuskan untuk menambahkan personel sipil disamping personel militer dalam pasukan pemeliharaan perdamaian untuk menangani konflik yang semakin kompleks dan rumit. Berdasarkan mandat tersebut, Indonesia kemudian mengirim pasukan Konga XXV/UNIFIL untuk periode 2008/2009 dan 2009/2010 ke Lebanon Selatan, yang terdiri dari 75 prajurit Polisi Militer TNI (Satgas POM TNI) yang bergerak di bawah komand *Force Commander of UNIFIL (FC Assessts)*. Pada tahun terakhir masa tugasnya, satgas POM TNI dipimpin oleh Letkol CPW Dwi Prasetyo Wiranto.

Selanjutnya di tahun 2008, Indonesia kembali mengirimkan pasukan tambahan bagi wilayah Lebanon Selatan melalui pengiriman pasukan Konga XXVI-A/UNIFIL sebagai satuan *Force Headquarter Support Unit (FHQSU)* dan INDO *Force Protection Company* (INDO FP Coy) yang terdiri dari 200 orang personel. Berbeda dengan formasi pasukan konga sebelumnya yakni INDOBATT yang tersebar di wilayah-wilayah kecil di Lebanon, FHQSU merupakan pasukan konga yang dikhususkan ditempatkan di UNIFIL Headquarter (HQ) di Naqoura. Tugas dari satgas ini adalah untuk mendukung pelayanan dan pengamanan di UNIFIL HQ. Masa tugas dari Konga XXVI-A/UNIFIL kemudian digantikan oleh Konga XXVI-B1/UNIFIL sebagai FHQSU dan Konga XXVI-B2/UNIFIL sebagai kompi pengamanan di UNIFIL HQ pada tahun 2009-2010. Setelah masa tugas mereka berakhir, mereka digantikan Oleh Konga XXVIC1/UNIFIL dan Konga XXVI-C2/UNIFIL. Dalam pasukan konga ini, terdapat reformasi pasukan dimana peran prajurit wanita terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian. Pada saat datang ke Lebanon di tahun 2010, pasukan Konga XXVI-C1 memberikan tambahan 5 prajurit wanita dalam struktur pasukan kontingen garuda., dan hingga saat ini, jumlah personel wanita dalam satuan pasukan kontingen garuda telah bertambah menjadi 32 personel (Hutabarat, 2014).

Adapun tugas dari pasukan Konga XXVI-C1 adalah sama dengan Konga XXVI-B1, sedangkan Konga XXVIC2 merupakan pengganti Konga XXVI-B2 dengan 7 tugas pokok seperti:

1. Menjaga Main Gate, melakukan patroli, *observation post*, dan menjaga food platoon,
2. Menyiapkan tim huru-hara (CRC) dengan kemampuan untuk mengendalikan massa,
3. Menyiapkan Tim Reaksi Cepat (QRT) yang dapat digerakkan setiap saat,
4. Melaksanakan pengawalan terhadap semua asset FC UNIFIL pada saat perjalanan di daerah operasi,
5. Sebagai bagian dari unit pertahanan terkoordinasi di wilayah UNIFIL HQ di Naqoura,
6. Memberikan bantuan perkuatan terhadap unsur-unsur UNIFIL lainnya yang berada di luar Naqoura Camp, dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah FC UNIFIL.

Untuk pasukan kontingen Garuda yang saat ini sedang bertugas yakni untuk periode 2015-2016, adalah sebanyak dari 1.169 Prajurit yang terdiri dari 850 personel Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-J/Unifil dipimpin Letkol Inf Dwi Sasongko, S.E., 75 personel Military Police Unit (MPU) Konga XXV-H/Unifil dipimpin Letkol Cpm Zulkarnain SH, 150 *personel Force Protection Company* (FPC) Konga XXVI-H2/Unifil dipimpin Mayor Inf Catur Sutoyo, 50 personel Satgas *Force Headquarter Support Unit* (FHQSU) Konga XXVI-H1/Unifil dipimpin Kolonel Kav Jala Argananto, 6 personel Satgas CIMIC TNI Konga XXXI-F/Unifil dipimpin Kapten Inf Batara Alex Bulu, 18 personel Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU) Konga XXX-F/Unifil dipimpin Mayor Inf Roni Agus Widodo, 9 personel Satgas Level 2 Hospital Konga XXIX-G/Unifil dipimpin Mayor Ckm Dr. Purbanto Budi Susetyo, SPM, dan 11 personel Milstaf Seceast Unifil dipimpin Kolonel Inf Abdul Rahman (Tribun News, 2015).

Dengan dikirimnya pasukan Konga XXIII-J/UNIFIL ini, maka Indonesia telah berkontribusi selama hampir 11 tahun dalam misi perdamaian

di Lebanon. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UNIFIL pada 5 April 2016, dari 10,547 personel pasukan pemeliharaan perdamaian yang ada di Lebanon, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pasukan terbanyak yang mencapai 1,295 personel. Hal ini tentu saja merupakan prestasi tersendiri bagi satuan militer Republik Indonesia.

Disamping terus meningkatkan jumlah personel militer TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon, pemerintah Indonesia juga meningkatkan personel unit yang dimilikinya dengan bergabung dalam UNIFIL Maritim Task Force (MTF) sejak tahun 2009 (Jurnal Jakarta, 2016). Satgas Maritim TNI pertama yang dikirimkan ke Lebanon adalah Konga XXVIII A/UNIFIL KRI Diponegoro-365, yang selanjutnya diikuti oleh Konga XXVIII-B/UNIFIL KRI Frans Kaisiepo-368 tahun 2010, Konga XXVIII-C/UNIFIL KRI Sultan Iskandar Muda-367 tahun 2011, Konga XXVIII-D/UNIFIL KRI Sultan Hasanuddin-366 tahun 2012, Konga XXVIII E/UNIFIL KRI Diponegoro-365 tahun 2013, Konga XXVIII-F/UNIFIL KRI Frans Kaisiepo-368 tahun 2014, dan yang sedang bertugas saat ini adalah Konga XXVIII-G/UNIFIL KRI Sultan Iskandar Muda-367 tahun 2015.

Tugas dari satgas Maritim ini adalah untuk melakukan *Surveillance* atau pengawasan dan *Maritime Interdiction Operation* (MIO) di sepanjang 180 km garis pantai Lebanon, guna mencegah masuknya senjata ilegal dan bahan terkait lainnya agar tidak masuk melalui perairan Lebanon yang mana jika sampai terjadi maka hal ini akan berdampak negatif pada kontinuitas konflik yang masih sering terjadi. Disamping itu, marinir TNI juga melakukan pelatihan bersama dengan angkatan laut *Lebanese Armed Force* (LAF) untuk menjaga wilayah perairan mereka. Dari segi persenjataan, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dipersajatai dengan teknologi nati kapal selam, anti aircraft, serta anti kapal permukaan. Satgas yang berkerja di bawah komando *Commander Task Force* (CTF) ini umumnya hanya ditugaskan selama satu periode atau selama 6 bulan sebelum melakukan rotasi.

Dalam meningkatkan kontribusinya untuk misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon, pasukan kontingen garuda tidak hanya melakukan hal-

hal atau aktivitas yang bernuansa militer saja. Akan tetapi, para personel konga juga melakukan beberapa kerja sosial dan pendidikan bagi masyarakat lokal di Lebanon (Wira, 2014). Beberapa kegiatan yang kemudian juga dilakukan oleh pasukan konga di Lebanon diantara seperti membuat mobil pintar atau smart-car yang menyediakan buku pendidikan dan komputer berjalan bagi anak-anak dan warga lokal di Lebanon, membangun lapangan bola dan mengadakan pertandingan persahabatan, melakukan pelatihan P3K, kursus komputer dan pelatihan bahasa inggris. Selain itu, pasukan konga juga membantu kegiatan penduduk lokal jika diperlukan seperti membantu memanem gandum, pengobatan massal, damkal, bantuan tenaga untuk kegiatan masyarakat, dan merenovasi rumah. Tidak hanya itu, pasukan konga juga membentuk tim kecil khusus yang bernama *Tim Tactical Outreach* yang bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian kepada warga di sekitar area penugasan jika diminta oleh kepala desa setempat, khususnya ke sekolah-sekolah yang ada di Lebanon, untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda atas pentingnya perdamaian dan juga membagikan buku serta alat tulis. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk usaha untuk membantu membangun masyarakat untuk menciptakan perdamaian serta sebagai amanat UNIFIL untuk mengenalkan hal-hal kecil yang berkaitan dengan UNIFIL, tak terkecuali pemahaman terkait Blue Barrel dan Blue Line yang merupakan daerah perbatasan antara Lebanon dan Israel.

Operasi pemeliharaan perdamaian di Lebanon, merupakan operasi perdamaian terbesar dan terlama yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Hingga saat ini, operasi ini masih menjadi salah satu misi perdamaian utama yang menjadi fokus dari pemerintah Indonesia. Komitmen Indonesia untuk terus terlibat dalam misi perdamaian kemudian ditunjukkan dengan dibentuknya Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers 2015-2019 yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada bulan Februari 2015 lalu. Pembentukan Roadmap Vision ini sekaligus menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam meningkatkan kontribusi untuk membantu menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

## B. Peran Indonesia dalam Membantu Masyarakat Sipil Lebanon

Kontingen Garuda/UNIFIL TNI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga perdamaian di wilayah Lebanon Selatan senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai bangsa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi sikap saling menghormati, ramah, sopan satu, musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan serta semangat gotong royong. Meskipun berada di bawah mandat PBB yang mengharuskan semua pasukan yang tergabung dalam misi untuk bertindak dalam koridor yang telah diatur, namun perilaku maupun sikap yang ditunjukkan oleh pasukan TNI yang berada di Lebanon Selatan tetap sebagaimana mereka ketika sedang berada di dalam negeri baik dalam menghadapi pihak yang bertikai, sesama kontingen UNIFIL maupun dengan masyarakat yang berada di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.

Kondisi tersebut tidak akan mampu diperoleh tanpa adanya kelebihan yang dimiliki oleh Kontingen Garuda/UNIFIL TNI. Kelebihan tersebut adalah bagaimana kemudian Kontingen Garuda/UNIFIL TNI dapat diterima dengan baik oleh penduduk dan membangun kedekatan dengan mereka di wilayah tersebut dibandingkan dengan kontingen dari negara-negara lain. Pasukan Indonesia bisa sangat diterima oleh masyarakat Lebanon itu disebabkan karena beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh pasukan dari negara-negara lainnya. Seperti misalnya dalam hal sopan santun, dimana setiap bertemu dengan penduduk, pasukan Indonesia selalu tersenyum dan menyapa. Jika mengendarai kendaraan tidak ugal-ugalan melainkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh PBB (Hapsoro, 2010).

Dalam tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Kontingen Garuda/UNIFIL TNI yakni melakukan upaya *peacebuilding*, rekonstruksi wilayah paska konflik pun menjadi salah satu tugas yang harus dijalankan. Dalam kegiatan rekonstruksi ini, Kontingen Garuda/UNIFIL TNI menggunakan metode gotong-royong seperti yang dilakukan di Indonesia dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan berbagai sarana

dan prasarana publik yang hancur akibat perang. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan maka akan menjadi jembatan untuk dapat mendekatkan diri dengan masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk memupuk rasa memiliki dari masyarakat terhadap fasilitas yang dibangun atau diperbaiki sehingga masyarakat diwilayah tersebut akan ikut menjaga dan memelihara fasilitas tersebut.

Karena di wilayah dimana kontingen lain melakukan rekonstruksi masyarakat cenderung mengabaikan fasilitas yang dibangun tersebut sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Metode lain yang digunakan oleh Kontingen Garuda/UNIFIL TNI adalah dengan mengimplementasikan pembinaan wilayah pertahanan. Pembinaan wilayah pertahanan hal ini dilakukan untuk memudahkan pengawasan serta penguasaan kondisi geografis maupun kondisi sosial, ekonomi dan kultural dari wilayah yang menjadi tanggung jawab Kontingen Garuda/UNIFIL TNI di Lebanon Selatan (Rachmat, 2016).

Hal ini dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Keberhasilan tugas yang dilaksanakan oleh TNI bukan karena peralatan utama sistem senjata yang dibawanya, namun lebih dikarenakan kemampuan untuk melakukan pembinaan teritorial dengan mengajak masyarakat untuk berdamai dan mendukung proses perdamaian yang sedang dilaksanakan (Supiadin, 2009). Pendekatan ini dilakukan dengan ikut serta dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sehari-hari atau dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan TNI.

Pasukan TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda/UNIFIL TNI tidak segan-segan untuk berbaur dengan masyarakat atau karena sebagian besar anggota kontingen Garuda beragama Islam, mereka pun ikut dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di wilayah tersebut karena masyarakat lokal didominasi oleh masyarakat muslim. Dengan menerapkan berbagai nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam kegiatan yang dilakukan terkait dengan upaya menjalankan tugas dan fungsi sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan terlihat bahwa kontingan Garuda yang



berasal dari Indonesia memiliki keistimewaan tersendiri baik dimata masyarakat maupun diantara sesama kotingen yang tergabung dalam UNIFIL. Kondisi ini yang menunjang keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari kontingen Garuda dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan.

Disamping itu hal ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap citra positif Indonesia yang didapatkan dari nilai-nilai yang telah diimplementasikan oleh pasukan TNI di Lebanon Selatan. Citra positif ini dibuktikan dengan penerimaan yang baik dari masyarakat di wilayah Lebanon Selatan terhadap pasukan TNI. Pasukan TNI senantiasa mendapatkan apresiasi dari masyarakat melalui tercemin dari mudahnya masyarakat di Lebanon Selatan dalam menerima keberadaan pasukan TNI, sehingga dalam beberapa kesempatan pasukan TNI yang bertugas di wilayah tersebut senantiasa mendapatkan undangan untuk menghadiri berbagai acara yang diadakan oleh masyarakat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Lebanon mampu meningkatkan citra Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merupakan cerminan dari idealisme bangsa Indonesia untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Platform politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia memberikan dorongan untuk terlibat secara aktif dan berkontribusi bagi upaya perdamaian di seluruh dunia. Kehadiran Indonesia dalam operasi perdamaian yang digelar secara internasional pada masa tersebut memiliki arti penting sebagai implementasi dari nilai politik luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia kepada dunia.

Kegiatan yang dilakukan oleh kontingen pasukan perdamaian Indonesia mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Lebanon pasca konflik. Hal ini terlihat dari bagaimana penerimaan yang diterima pasukan perdamaian Indonesia dari masyarakat Lebanon. Pasukan TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda/UNIFIL TNI tidak segan-segan untuk berbaur dengan masyarakat atau karena sebagian besar anggota kontingen Garuda beragama Islam, mereka pun ikut dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di wilayah tersebut karena

masyarakat lokal didominasi oleh masyarakat muslim. Dengan menerapkan berbagai nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam kegiatan yang dilakukan terkait dengan upaya menjalankan tugas dan fungsi sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan terlihat bahwa kontingen Garuda memiliki keistimewaan tersendiri baik dimata masyarakat maupun diantara sesama kontingen yang tergabung dalam UNIFIL. Kondisi ini yang menunjang keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari kontingen Garuda dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Setiawati, Siti Mutiah. Dilemma Indonesia dalam Menjalankan Peranan Penyelesaian Konflik Timur Tengah. *Artikel Seminar Nasional*. 2016
- [2] Yulianto, Ari Mayor. *Lebanon Pra dan Pasca Perang 34 Hari Irael-Hizbullah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 2010.
- [3] Rachmat, Angga Nurdin. Diplomasi Publik Indonesia Melalui Kontingen Garuda/ UNIFIL Tentara Nasional Indonesia di Lebanon Selatan. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Vol 12 No 1, pp 1-14. 2016.
- [4] Sirmareza, Trio. Naval Diplomacy dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia di United Nations Interim Force In Lebanon. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*. Vol 3 No 1, pp 1-21. 2017.
- [5] Hutabarat, Leonard F. Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Vol 11 No 1, pp 47-65. 2015.
- [6] Islamiyah, Nur,. Trilaksana, Agus. Aspek Historis Peranan PBB dalam Penyelesaian Konflik Palestinaisrael 1967-1995. *Jurnal*. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Vol 4, No.1, pp 902-916. 2016.
- [7] Sotomayor, Arturo C. Why Some States Participate in UN Peace Missions While Other Do Not : An Analysis of Civil-Military Relations and Its. 2010.
- [8] Findlay, Trevor. *Challenges for the New Peacekeepers*, Oxford University Press / SIPRI, Oxford. 1996.

- [9] Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- [10] Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* edisi kedua. Jakarta: Erlangga. 2007.